

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung

I Made Yasa Wirama¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia.
Email: yasawirama@gmail.com

Ni Gusti Putu Wirawati²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Badung. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah digunakan empat variabel untuk mengukurnya yaitu perencanaan anggaran (X_1), Implementasi/pelaksanaan anggaran (X_2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X_3), dan evaluasi kinerja (X_4). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 100 orang yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, implementasi anggaran pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi anggaran secara bersamaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Kata Kunci : Pengelolaan; Perencanaan; Pelaksanaan; Pelaporan; Akuntabilitas.

The Effect of Regional Financial Management on Performance Accountability in the Badung Regional Work Unit

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of regional financial management on performance accountability in the regional work unit of Badung Regency. To determine the influence of regional financial management, four variables are used to measure it, namely budget planning (X_1), implementation/implementation of the budget (X_2), reporting/budget accountability (X_3), and performance evaluation (X_4). Method of determined sample in this study used purposive sampling technique, so that obtained a total sample of 100 people consisted of the Regional Government Budget Team. The data analysis technique used to test the hypothesis of this research is multiple linear regression analysis. The results showed that budget planning, implementation of budget accountability budgets, and simultaneous budget evaluations had a significant positive effect on the performance of government agencies in the Regional Work Unit of the Badung Regency

Keywords : Management; Planning; Implementation; Reporting; Accountability.



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 8 No. 2
Denpasar, Oktober
2019
Hal. 17-31

Artikel masuk:
11 Juni 2019

Tanggal diterima:
03 Juli 2019

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia terjadi karena sistem pengelolaan sebelumnya dianggap memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga tidak mampu lagi mengikuti dinamika kenegaraan di Indonesia. Diberlakukannya UU 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara mampu memberikan perubahan didalam pengelolaan Keuangan Negara, salah satunya adalah diperkenalkan metode penganggaran basis kinerja didalam penyusunan anggaran-amggaran pemerintah. Selain itu, dikeluarkannya UU 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan daerahnya sendiri dan otomatis berdampak adanya perubahan dalam tata kelola keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terciptanya reformasi dalam manajemen keuangan daerah.

Diterapkannya sistem desentralisasi, maka pemerintah melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menjelaskan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD berarti kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas telah terpenuhi (Haspiarti, 2012). Kinerja merupakan pencapaian sasaran, visi, dan misi yang telah direncanakan sebelumnya. Cipta (2011) penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. Menurut Bastian (2010) bahwa Anggaran Berorientasi Kinerja (*Performance Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output (Mardiasmo 2009). Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik (Haspiarti, 2012). Penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Haspiarti, 2012).

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja mewajibkan Instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah pusat wajib menyampaikan pelaporannya.

Pejabat yang melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing adalah Penanggung jawab penyusunan LAKIP, selanjutnya keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai instansi dijelaskan serta dipertanggungjawabkan oleh pimpinan instansi dan tim kerja (Paramitha & Gayatri, 2016). LAKIP tersebut digunakan untuk mengetahui sukses atau tidaknya instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. APBD di Kabupaten Badung telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan sistem penganggaran kinerja Peraturan Pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran pemerintah diharapkan mampu terealisasi sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Laporan realisasi APBD Kabupaten Badung tahun 2017 disajikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja	5.214.266.110.521,05	4.461.016.113.586,65	85,55
Belanja Operasi	3.719.827.973.121,25	3.209.262.999.932,26	86,27
Belanja Pegawai	1.371.242.483.279,71	1.189.225.154.119,05	86,73
Belanja Barang dan Jasa	1.673.478.474.994,54	1.411.318.047.866,21	84,33
Belanja Subsidi	9.340.792.000,00	7.476.567.750,00	80,04
Belanja Hibah	546.784.282.847,00	500.440.835.697,00	91,52
Belanja Bantuan Sosia	118.981.940.000,00	100.802.394.500,00	84,72
Belnja Modal	1.478.700.771.699,80	1.239.565.173.922,39	83,83
Belanja Modal Tanah	85.000.000.000,00	36.602.621.150,00	43,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.100.088.747,00	299.189.364.238,22	88,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	551.616.721.638,40	473.836.046.665,47	85,90
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	499.093.757.121,40	426.806.712.846,70	85,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.890.204.193,00	3.130.429.022,00	80,47
Belanja Tak Terduga	15.737.365.700,00	12.187.939.732,00	77,45
Belanja Tak Terduga	15.737.365.700,00	12.187.939.732,00	77,45

Sumber: <http://apbd.badungkab.go.id>

Berdasarkan dari Tabel 1., dapat dilihat perealisasi anggaran Kabupaten Badung tahun 2017 terdapat beberapa anggaran yang direncanakan tidak tercapai/terrealisasi secara maksimal. Berdasarkan tabel diatas, untuk program/kegiatan menunjukkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasiannya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain realisasi belanja daerah lebih rendah daripada anggaran belanja daerah yang dianggarkan. Kondisi ini diduga disebabkan adanya program/kegiatan yang belum terlaksanakan.

Fungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik merupakan fungsi lain dari anggaran pada instansi pemerintah. Penggunaan anggaran sebagai alat akuntabilitas publik, harus dipertanggungjawabkan

dengan menggunakan hasil yang dibelanjakannya dana publik tersebut (Haspiarti, 2012). Dengan begitu akan diperoleh capaian mengenai kinerja pemerintah. Herawaty (2011) dalam penelitiannya melakukan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan pengendalian akuntansi, sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akuntabilitas Kantor Pemerintahan di Kota Jambi. Kurniawan (2009) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa penganggaran yang berbasis kinerja memiliki pengaruh positif serta signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Menurut Harjanti (2009) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Haspiarti (2012) melakukan penelitian, secara simultan perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, secara parsial hanya variabel perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh signifikan sisanya tidak. Endrayani, *et al.*, (2016) melakukan penelitian dengan hasil penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Wibisono (2016) melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukan anggaran berbasis kinerja diukur menggunakan tiga variabel adalah perencanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan implementasi/pelaksanaan anggaran sama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yaitu digunakan 4 (empat) variabel dalam pengukuran penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu evaluasi kinerja (X_4), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X_3), pelaksanaan anggaran (X_2), dan perencanaan anggaran (X_1).

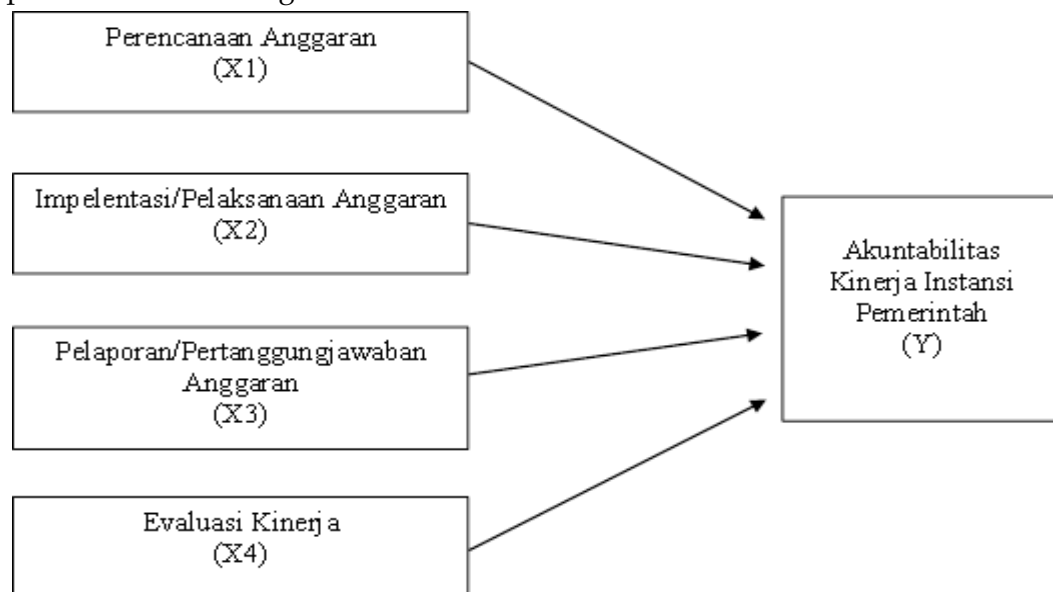
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*), teori kontinjensi, dan teori implementasi kebijakan. Teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) (Jensen & Meckling 1976). Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*. Lane (2000) mengatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik, karena negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian *principal-agent*, yang berarti antara pemerintah (*agent*) dan rakyat (*principal*) memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Halim & Syukriy (2006) yang menyatakan bahwa didalam pemerintahan daerah terdapat hubungan saling terkait dalam masalah keagenan.

Teori kontinjensi menurut Duncan & Mooress (1989) menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah suatu fungsi kesesuaian antara struktur organisasi dan lingkungan dimana organisasi itu beroperasi. Kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem kontrol dengan variabel kontinjensi dihipotesakan menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat (Fisher, 1998). Penggunaan konsep kesesuaian (*fit*) dalam teori kontinjensi menunjukkan tingkat kesesuaian

antara faktor-faktor kontekstual (kontinjensi) dan sistem akuntansi manajemen (seperti sistem penganggaran) akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Teori implementasi kebijakan terdapat empat variabel kebijakan publik implementasi yaitu sumber daya (*resources*), Komunikasi (*communications*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dan sikap (*dispositions* atau *attitudes*) (Edwards, 1980). Empat faktor itu harus dilakukan dengan serentak karena satu dan lainnya memiliki keterkaitan yang erat. Sistem manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di sektor publik (Andrian, *et al.*, 2018).

Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Data Penelitian, 2019

Pengelolaan keuangan adalah semua kegiatan yang terdiri dari perencanaan, implementasi, pemberitahuan, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan Abi & Endar (2018). Jauhari (2017) mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang akan berdampak pada pertanggungjawaban anggaran. Penelitian pendahulu yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) mengungkapkan hasil penelitian bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tujuan anggaran. Anggaran yang baik adalah anggaran memiliki kualitas yang baik dan realistis, karena dengan pengendalian yang efektif, maka

pelaksanaan anggaran akan lebih baik dan akuntabilitas publik akan meningkat. Haspiarti (2012) mengungkapkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sembiring (2016) mengungkapkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Friska (2014) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Menurut Hanifah (2015) salah satu tujuan akuntansi daerah adalah menyediakan laporan keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Friska (2014) di dalam penelitiannya mengungkapkan pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan harus disajikan dalam laporan keuangan yang berkualitas (Nahar, at al., 2017). Pada penelitian Haspiarti (2012) valuasi kinerja tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja. Sembiring (2016) evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja kantor Pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten dengan ibu kota Mengwi, yang memiliki 6 kecamatan, 16 kelurahan, dan 46 desa. Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan disebelah barat, dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar disebelah timur.

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi *input*, *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ada beberapa tahapan yang harus

dilakukan, yaitu implementasi anggaran, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran.

Pengukuran variabel perencanaan anggaran menggunakan 10 pernyataan, yang dikembangkan oleh Haspiarti (2012) dinilai dengan menggunakan skala *likert*. Selama tahap implementasi anggaran, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan. Pengukuran variabel implementasi anggaran menggunakan 3 pernyataan yang dikembangkan oleh Haspiarti (2012) dinilai dengan menggunakan skala *likert*.

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Pengukuran variabel pelaporan menggunakan 3 pernyataan, yang dikembangkan oleh Hapiarti (2012) dinilai dengan menggunakan skala *likert*. Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa, melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut. Pengukuran variabel evaluasi kinerja menggunakan 3 pernyataan, yang dikembangkan oleh Haspiarti (2012) dinilai dengan *likert scale*.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja. Pengukuran variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan 10 indikator yang dikembangkan oleh Haspiarti (2012). Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Pengukuran variabel-variabel pada penelitian ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

Populasi adalah wilayah umum atau generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai standar tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria responden yang dipilih, yaitu sebagai berikut: 1) Staf yang berkaitan dengan Tim Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 2) Sekretaris/ Kabid/ Kabag, Kepala Dinas/ Badan/, Kasubbag/ Kasubdis/ Kasie, Instansi Kasubid/ di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang berupa persepsi dari para responden atas variabel-variabel yang digunakan. Cara mendapatkan data tersebut dengan membagikan kuesioner kepada responden ke SKPD Kabupaten Badung. Menurut Sugiyono (2016), kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Hasil kuesioner diukur dengan skala likert, pilihan jawaban responden akan

diberi nilai dengan skala poin 5 sebagai skor tertinggi dengan poin 1 untuk skor terendah.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2014). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan dari hasil *scoring* dari jawaban para responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar (Sugiyono, 2016). Data kualitatif dalam penelitian ini susunan kelembagaan Kabupaten Badung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut merupakan bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas kinerja
- X₂ = implementasi anggaran
- X₁ = perencanaan anggaran
- X₄ = evaluasi kinerja
- X₃ = pertanggungjawaban anggaran
- α = Konstanta
- β₁ = Koefisien regresi variabel perencanaan anggaran
- β₂ = Koefisien regresi variabel implementasi anggaran
- β₃ = Koefisien regresi variabel pertanggungjawaban anggaran
- β₄ = Koefisien regresi variabel evaluasi kinerja
- e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan melakukan uji validitas instrumen, maka hasil penelitian diharapkan akan menjadi valid. instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total item. Dengan melakukan uji reliabilitas instrumen, suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Pengujian reliabilitas tiap butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen penelitian ini menggunakan metode koefisien *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini menunjukkan variabel Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja dan akuntabilitas kinerja memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh pernyataan tersebut memenuhi syarat reliabilitas instrumen dan dapat dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil jawaban dari responden pada setiap indikator variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Perencanaan Anggaran	100	25.00	50.00	42.7700	3.59813
Implementasi Anggaran	100	7.00	15.00	12.7100	1.42343
Pertanggungjawaban anggaran	100	7.00	15.00	12.5400	1.42432
Evaluasi Kinerja	100	7.00	15.00	12.7600	1.47792
Akuntabilitas Kinerja	100	25.00	50.00	43.4700	3.32561
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2018

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini, perencanaan Anggaran (X_1) memiliki nilai maksimum sebesar 50,00 dan nilai minimum sebesar 25,00. Standar deviasi pada variabel perencanaan anggaran adalah sebesar 3,59. Nilai rata-rata sebesar 42,77 yang menunjukkan respon dari responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan, artinya perencanaan anggaran cenderung tinggi.

Implementasi Anggaran (X_2) mempunyai nilai maksimum sebesar 15,00 dan nilai minimum sebesar 7,00. Nilai rata-rata sebesar 12,71 yang menunjukkan respon dari responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan, artinya implementasi anggaran cenderung tinggi. Standar deviasi pada variabel implementasi anggaran adalah sebesar 1,42. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 1,42.

Evaluasi kinerja (X_4) memiliki nilai minimum sebesar 7,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00. Nilai rata-rata 12,76 yang menunjukkan respon dari responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan, artinya evaluasi kinerja cenderung tinggi. Standar deviasi pada variabel evaluasi kinerja adalah sebesar 1,47. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 1,47.

Pertanggungjawaban anggaran (X_3) mempunyai nilai maksimum sebesar 15,00 dan nilai minimum sebesar 7,00. Standar deviasi pada variabel pertanggungjawaban anggaran adalah sebesar 1,42. Nilai rata-rata sebesar 12,54 yang menunjukkan respon dari responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan, artinya pertanggungjawaban anggaran cenderung tinggi. Kinerja Akuntabilitas (Y) mempunyai nilai maksimal sebesar 50,00 dan nilai minimal sebesar 25,00. Standar deviasi pada variabel akuntabilitas kinerja adalah sebesar 3,32, Nilai rata-rata 43,47 yang menunjukkan respon dari responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan artinya akuntabilitas kinerja cenderung tinggi.

Model regresi dikatakan model yang baik apabila dalam model tersebut bebas dari asumsi klasik statistik. Suatu model regresi linear berganda secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi persyaratan asumsi klasik regresi, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas merupakan suatu uji statistik yang digunakan

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dan lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah memenuhi syarat normalitas dan data tersebut dikatakan berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya atau bebas dari gejala multikolinear. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Hasil pengujian *tolerance* menunjukan seluruh variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF juga menunjukan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Metode *glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap absolut residual. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa signifikansi variabel lebih dari ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil kesimpulan dalam model regresi tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Badung. Seberapa besar nilai signifikan dari semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat dapat dilihat dari hasil regresi. Adapun hasil analisis regresi dapat di lihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi		T	Sig
	B	Std. Error		
Constant	9,998	2,115	4,728	0,000
Perencanaan anggaran	0,348	0,074	4,680	0,000
Implementasi anggaran	0,512	0,173	2,966	0,004
Pertanggungjawaban anggaran	0,503	0,163	3,085	0,003
Evaluasi kinerja	0,451	0,173	2,602	0,011
F Statistik	: 67,560			
Sig F	: 0,000			
Adjusted R ²	: 0,729			

Sumber: Data Penelitian, 2018

Nilai konstanta (α) sebesar 9,998 berarti bahwa jika nilai implementasi anggaran, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban anggaran sama dengan nol, maka nilai akuntabilitas kinerja (Y) sebesar 9,998 satuan. Nilai koefisien (β_1) sebesar 0,348 berarti apabila nilai perencanaan

anggaran meningkat sebesar satu satuan, maka nilai akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 0,348 satuan, dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,512 berarti apabila nilai implementasi anggaran meningkat satu satuan, maka nilai akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 0,512 satuan, dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Nilai koefisien (β_3) sebesar 0,503 berarti apabila nilai pertanggungjawaban anggaran meningkat satu satuan, maka nilai kinerja akuntabilitas akan meningkat sebesar 0,503 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien (β_4) sebesar 0,451 berarti apabila nilai evaluasi kinerja meningkat satu satuan, maka nilai akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 0,451, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Koefisien determinasi yang dihasilkan di dalam penelitian ini sebesar 0,729 yang berarti bahwa sebesar 72,9% akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dipengaruhi oleh implementasi anggaran, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran sedangkan sebesar 27,1% dipengaruhi dari variabel lain di luar variabel penelitian.

Berdasarkan hasil Uji F dapat dilihat F hitung sebesar 67,560, signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Ini berarti variabel independen didalam penelitian, dapat dipergunakan untuk prediksi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung atau dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Sehingga model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis pada pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung hasil menunjukkan (Signifikansi t 0,000 < 0,05) serta betakoefisien sebesar 0,348 ini berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan, maka akan semakin baik juga akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Perencanaan anggaran yang baik dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Perencanaan adalah proses dasar bagi organisasi atau instansi dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dalam organisasi.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) mengungkapkan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan Wibisono (2016), mengungkapkan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian hipotesis pada pengaruh implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung

dengan hasil (Sig. t 0,004 < 0,05) serta koefisien beta sebesar 0,512 yang menunjukkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik implementasi anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Implementasi anggaran yang baik dilakukan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Implementasi anggaran merupakan realisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan pemerintah, dengan implementasi yang baik maka visi, misi, dan rencana strategis dapat tercapai dengan baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Friska (2014) dan Francis (2009) mengungkapkan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sembiring (2016) mengungkapkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja akuntabilitas kantor pemerintahan.

Pengujian hipotesis pada pengaruh pertanggungjawaban anggaran terhadap kinerja akuntabilitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung hasil menunjukkan (Signifikansi t 0,003 < 0,05) serta koefisien sebesar 0,503 yang berarti, pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja akuntabilitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik pertanggungjawaban anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja harus dilakukan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan terkait pertanggungjawaban anggaran instansi pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanifah (2015) salah satu tujuan akuntansi daerah adalah menyediakan laporan keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Haspiarti (2012) dan Jones (2008) di dalam penelitiannya mengungkapkan pelaporan/ pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Friska (2014) mengungkapkan pelaporan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian hipotesis pada pengaruh evaluasi kinerja pada akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung hasil menunjukkan Signifikansi t 0,011 < 0,05 serta koefisien sebesar 0,451 yang berarti bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik evaluasi kinerja maka akan semakin baik kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja harus dilakukan evaluasi kinerja yang baik, agar organisasi atau instansi mengetahui realisasi dan kendala yang ditemui dalam pencapaian misi, sehingga organisasi atau instansi dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2016) dan Choi, *et al.*, (2010) evaluasi kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian lain yang dilakukan Friska (2014) mengungkapkan evaluasi kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasidan sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi manajemen sektor publik secara umum. Terdapat bukti empiris bagi peneliti dalam pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini didukung oleh teori-teori bahwa keefektifan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat memungkinkan meningkatnya kinerja dalam organisasi sektor publik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, implementasi anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya diharapkan sebelum melakukan penelitian atau pengumpulan data agar melakukan survei atau peninjauan terlebih dahulu ke tempat yang ingin diteliti, sehingga data yang akan dikumpulkan lebih maksimal. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, karena hasil Adjusted Square (R^2) sebesar 72,9% yang berarti masih ada 27,1% variabel lain yang mempengaruhi seperti informasi asimetri dan ketidakpastian lingkungan.

REFERENSI

- Abi, Syahudin, dan Endar Pituringsih. 2018. Determinant of Regional Financial Management Accountability and its Consequences to the Stakeholder Trust: A Study at Regional Government in Dompu, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol 17(1), pp : 45-67.
- Andrian, Yoki, *et al.* 2018. The Influence of Information Systems Application for Regional Financial Management, Human Resources Competency and Understanding Of Government Accounting Standards on Regional Financial Management Performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, Vol 17(2), pp : 100-111.
- Cipta, H. 2011. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). *Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas*, Vol 10(1), hal: 23-32.
- Choi, S. 2010. Audit Office Size Audit Quality and Audit Pricing. *Journal Auditing Of Practice & Theory*, Vol. 29 (1), pp: 73-97
- K. & Moores Duncan, , K. 1988. A Better Methodology for Contingency Studies :Residual Analysis in Accounting Management. *Journal Accounting Management Research*.Vol 1(1), pp: 11-24.

- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., & Darmawan, N. A. S. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 15(1), hal: 80-130.
- J. G Fisher,. 1997. *Management Control Systems and Firm Outcomes :Contingency Theory, Future Directions and Past Result. Accounting in Behavioral Research*, Vol 1(2), pp: 67-83.
- francis, J. R. dan Yu, D., M. 2009. *Big 4 Office Size and Audit Quality. The Accounting Review*, Vol 8 (4), pp: 1521-1552.
- Friska, I. Y. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jambi*, Vol 13(1), hal: 9-11.
- Hanifah, Indah Suci. 2015. Akuntanilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Indonesia*. Vol 14(1), hal: 35-78.
- Herawaty, N. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol 10(2), hal: 91-122.
- Iyoha, F.O. & D. Oyerinde. 2010. Accounting Infrastructure and Accountability in the Management of Public Expenditure in Develoving Countries: A Focus On Nigeria. *Critical Perspective on Accounting*, Vol 9(1), pp: 33-37.
- Jauhari. 2017. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. *Jurnal Universitas Pasundan*, Vol 16(1), hal: 109-114.
- Jensen & Meckling. 1976. The Theory of the Firm:Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finacial and Economics*, Vol 7(1), pp: 13-32.
- Jones, M., J. 2008. Internal Control, Accountability and Corporate Governance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21 (7), pp: 1052-1075.
- Kurniawan. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan. *Skripsi*, Vol. 8(2), hal: 13-19.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concept, Models and Approaches*. Journal of SAGE Publications, Vol 1(3), pp: 123-131.
- Libby, R. dan Luft, J. 1993. Determinants of judgement performance in accounting setting: ability, knowledge, motivation and environment. *Accounting Organizations and Society*. 18 (1), pp: 425-450.
- Mahpudin, Endang. 2017. Analisis Penganggaran Implementasi Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Instansi Pemerintah Daerah). *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol.16(1), hal: 23-24.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.
- Nahar, Aida, et al. 2017. The Analysis of Human Resources Policies and Regional Financial Accounting System on Regional Government Financial Statements

- Quality. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economic and Business*, Vol 16(1), pp: 53-67.
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. 2016. Pengaruh Ketetapan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 15(3), pp: 97-133.
- Patrick. 2007. The Adoption of GASB 34 Innovativeness The Determinants of Organizational in Pennsylvania local government. Ph.D. Dissertation. *Pennsylvania Journal State University*, Vol. 6 (1), pp: 133-147.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sembiring, R. A. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya*, Vol 15(1), hal: 61-103.
- Sabatier, Paul. 1986. Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy*, Vol. 6(1), pp: 21-48.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., R., Mandasari, P. dan Alistair, B. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. *Journal Public Policy*, Vol. 9 (2), pp: 34-41
- Suriani, S. 2015. The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo). *Jurnal Information Management and Business*, Vol 14(1), pp: 74-95.
- Verasvera, F. A. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen, Universitas Katolik Parahyangan*, Vol 15(1), pp: 79-91.
- Wibisono, Seto. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, Vol 15(1), hal: 13-17.
- Ye, K., Cheng, Y. dan Gao, J. 2014. How Individual Auditor Characteristics Impact The Likelihood of Audit Failure: Evidence From China. *Journal Advances In Accounting Incorporating Advances In International Accounting*, Vol. 13(1) pp: 394-401.